

JURNAL SKRIPSI

**KEWAJIBAN AMDAL TERHADAP REVITALISASI
BANGUNAN CAGAR BUDAYA UNTUK KEPENTINGAN USAHA
DI KAWASAN CAGAR BUDAYA KOTABARU DI KOTA YOGYAKARTA**



Diajukan oleh :

Peggy Junitan

NPM	:	160512268
Program Studi	:	Ilmu Hukum
Program Kekhususan	:	Pertanahan dan Lingkungan Hidup

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
2019

HALAMAN PERSETUJUAN

JURNAL SKRIPSI

**KEWAJIBAN AMDAL TERHADAP REVITALISASI
BANGUNAN CAGAR BUDAYA UNTUK KEPENTINGAN USAHA
DI KAWASAN CAGAR BUDAYA KOTABARU DI KOTA YOGYAKARTA**



Diajukan oleh :

Peggy Junitan

NPM : 160512268
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Pertanahan dan Lingkungan Hidup

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing pada Tanggal 16 Januari 2020

Dosen Pembimbing

Prof. Dr. Dra. MG Endang Sumiarni S.H., M.Hum.



Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum

KEWAJIBAN AMDAL TERHADAP REVITALISASI BANGUNAN CAGAR BUDAYA UNTUK KEPENTINGAN USAHA DI KAWASAN CAGAR BUDAYA KOTABARU DI KOTA YOGYAKARTA

PEGGY JUNITAN

Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Email : peggyjunitan@gmail.com

ABSTRACT

Revitalization on Kotabaru Cultural Heritage Sector has been done several times, such as revitalizing residential home to home business. The aim of this research is to find out the Environmental impact assessment's obligation towards the revitalization on business interest at the mentioned sector. Researchers are taking normative law research which focused on legislation. Based on Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 about Izin Lingkungan says "Activities and/or attempt that is not included in Environmental impact assessment 's mandatory criteria then has to UKL-UPL". Therefore any revitalization for business interest on Kotabaru Cultural Heritage Sector needs to have Environmental impact assessment otherwise it has to UKL-UPL.

Keywords: Cultural Heritage, Revitalization, Environmental Impact Assessment, Kotabaru.

1. PENDAHULUAN

a. Latar Belakang

Cagar Budaya dapat diketahui dan ditentukan berdasarkan dari hasil penelitian, kajian dan studi, sehingga secara akademik dapat dipertanggung jawabkan. Oleh karena itu, diperlukannya kegiatan pelestarian yang tujuannya untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan Cagar Budaya. Cagar Budaya terdiri dari lima jenis yang salah satunya merupakan Kawasan Cagar Budaya. Kawasan Cagar Budaya adalah tidak hanya berupa satu situs, akan tetapi bisa merupakan suatu lokasi yang lebih luas yang terdiri dari paling sedikit dua situs.¹ Kawasan Cagar Budaya yang bangunannya sudah rusak dapat dilakukan revitalisasi. Revitalisasi

merupakan bagian dari kegiatan pelestarian di bidang pengembangan. Pengertian pengembangan dalam Pasal 1 angka 29 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya yang intinya yaitu pengembangan adalah meningkatkan nilai-nilai Cagar Budaya serta pemanfaatannya melalui Penelitian, Revitalisasi, dan Adaptasi untuk pelestarian Cagar Budaya.

Revitalisasi yang dilakukan harus memperhatikan tata ruang, tata letak, fungsi sosial, budaya asli yang bertujuan untuk menata kembali fungsi ruang dan nilai budaya di Kawasan Cagar Budaya dapat dilihat dalam pasal 80 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya yang berkaitan dengan revitalisasi. Pengertian revitalisasi dalam Pasal 1 butir 31 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya yang intinya bahwa Revitalisasi adalah kegiatan untuk membangun bangunan baru dan menumbuhkan

¹ Muhammad Abdun Nasir, 2015, Semarang, diakses <https://lib.unnes.ac.id/21663/1/8111410057-s.pdf>, diakses pada tanggal 15 November 2019 pukul 14.39 WIB.

kembali nilai-nilai Cagar Budaya, tidak hanya untuk kepentingan pribadi tetapi juga untuk kepentingan umum misalnya untuk kepentingan ilmu pengetahuan, teknologi, pendidikan, pariwisata, agama, sejarah dan kebudayaan. Kegiatan tersebut juga berkaitan dengan larangan terhadap revitalisasi yaitu tidak mengubah fungsi ruang Situs Cagar Budaya atau Kawasan Cagar Budaya yang terdapat dalam Pasal 81 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.

Setiap pembangunan termasuk di Kawasan Cagar Budaya diperlukan analisis mengenai dampak lingkungan untuk mengurangi konsekuensi dampak negatif yang akan timbul dari pembangunan yang terus berkembang semakin meningkat. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) adalah salah satu perangkat preventif pengelolaan lingkungan hidup dan juga menjadi salah satu persyaratan utama dalam memperoleh izin lingkungan yang mutlak dimiliki sebelum diperoleh izin usaha.² Izin usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL diatur dalam ketentuan lebih lanjut mengenai jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan AMDAL berdasarkan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.³ AMDAL diharapkan dapat mencegah pencemaran dan kerusakan lingkungan terhadap pembangunan rumah dan pembangunan di Kawasan Cagar Budaya, sehingga dengan adanya peran

AMDAL dapat dimanfaatkan untuk keberadaan Cagar Budaya.

Keberadaan Cagar Budaya merupakan kekayaan kultural yang mengandung nilai-nilai kearifan budaya lokal yang penting sebagai dasar pembangunan kepribadian, pembentukan jati diri, serta benteng ketahanan sosial budaya masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta. Salah satu keistimewaan yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta yang diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta adalah di bidang kebudayaan selain di bidang tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur; kelembagaan Pemerintahan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta; pertanahan; dan tata ruang. Di Kota Yogyakarta hanya ada enam kawasan yang dijadikan Kawasan Cagar Budaya berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 186 Tahun 2011 tentang Penetapan Kawasan Cagar Budaya, ada enam (6) Kawasan Cagar Budaya yaitu Kotagede, Keraton, Malioboro, Pakualaman, Kotabaru, dan Imogiri.⁴ Bangunan-bangunan Cagar Budaya yang berada di Kawasan Cagar Budaya Kotabaru banyak dilakukan revitalisasi. Dalam Pasal 64 ayat (3) huruf d Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelestarian Warisan Budaya dan Cagar Budaya yaitu untuk

² Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, 2009, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Lembaran Negara Nomor 5059, CV. Eko Jaya, Jakarta, hlm. 107.

³ Muhammad Akib, 2014, *Hukum Lingkungan: Perspektif Global dan Nasional*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 119.

⁴ Fahmi Prihantoro, 2019, "Peningkatan Kesadaran terhadap Cagar Budaya di Kotabaru Melalui Kegiatan Jelajah Wisata *Heritage* bagi Generasi Muda di Kota Yogyakarta", *Bakti Budaya*, Vol. 2 No. 1 April 2019, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, hlm. 68. Lihat juga Drs. Ign. Eka Hadiyanta, M.A, 2015, "Kawasan Cagar Budaya Di Yogyakarta: Citra, Identitas, dan Branding Ruang", *Jurnal Widya Prabha*, Vol-04/IV/2015 ISSN 2302-8998, Balai Pelestarian Cagar Budaya, Yogyakarta, hlm. 4.

bangunan baru yang dilakukan revitalisasi di Kawasan Cagar Budaya Kotabaru memakai gaya arsitektur Indis dan Kolonial. Berdasarkan apa yang telah penulis paparkan maka penulis mengambil judul berkaitan dengan kewajiban AMDAL terhadap revitalisasi Bangunan Cagar Budaya untuk kepentingan usaha di Kawasan Cagar Budaya Kotabaru di Kota Yogyakarta.

b. Rumusan Masalah

Bagaimanakah kewajiban AMDAL terhadap revitalisasi Bangunan Cagar Budaya untuk kepentingan usaha di Kawasan Cagar Budaya Kotabaru di Kota Yogyakarta?

c. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin peneliti capai dalam penelitian hukum ini adalah kewajiban AMDAL terhadap revitalisasi Bangunan Cagar Budaya untuk kepentingan usaha di Kawasan Cagar Budaya Kotabaru di Kota Yogyakarta.

2. METODE

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang akan digunakan peneliti adalah penelitian normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang berfokus pada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kewajiban AMDAL terhadap revitalisasi Bangunan Cagar Budaya untuk kepentingan usaha di Kawasan Cagar Budaya Kotabaru di Kota Yogyakarta. Penelitian hukum normatif ini berupa data sekunder.

b. Data

Data digunakan dalam penelitian normatif ini adalah data sekunder. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan

dalam sistem hierarki peraturan perundang-undangan sesuai ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yaitu:

a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 32 ayat (1) Perihal negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.

b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan, Pasal 1 huruf d Perihal pengertian usaha.

c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, Pasal 38 Perihal pelestarian Cagar Budaya.

d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 23 ayat (1) huruf e Perihal kriteria kegiatan yang berdampak penting yang wajib dilengkapi AMDAL salah satunya proses dan kegiatan yang hasilnya akan mempengaruhi pelestarian kawasan konservasi sumber daya alam dan/atau perlindungan cagar budaya; Pasal 25 Perihal dokumen AMDAL untuk kegiatan dan/atau usaha.

e) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, Pasal 1 butir 1 Perihal pengertian Cagar Budaya; Pasal 1 butir 6 Perihal pengertian Kawasan Cagar Budaya; Pasal 1 butir 31 Perihal pengertian revitalisasi; Pasal 5 Perihal kriteria yang harus dipenuhi sebagai Cagar Budaya; Pasal 10 Perihal kriteria Kawasan Cagar Budaya; Pasal 80 Perihal

revitalisasi, Pasal 81 Perihal larangan revitalisasi.

- f) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, pasal Perihal Pasal 7 ayat (2) Perihal bidang kebudayaan selain di bidang tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur
 - g) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, Pasal 1 butir 2 Perihal pengertian AMDAL; Pasal 5 ayat (1) Perihal penyusunan dokumen AMDAL.
 - h) Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelestarian Warisan Budaya dan Cagar Budaya, Pasal 47 Perihal yang harus diperhatikan terhadap revitalisasi cagar budaya; Pasal 64 Perihal kriteria yang harus dipenuhi untuk bangunan baru pada Kawasan Cagar Budaya.
 - i) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 62 Tahun 2013 tentang Pelestarian Cagar Budaya, Pasal 30 Perihal revitalisasi.
 - j) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup, Pasal 4 Perihal Dokumen AMDAL.
 - k) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 38 Tahun 2019 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisa Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Pasal 6 ayat (1) Perihal kewajiban AMDAL yang dikecualikan.
- 2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan pendapat hukum dan pendapat non hukum yang diperoleh dari bahan pustaka yang memberikan petunjuk maupun penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, jurnal, hasil penelitian, tesis, laporan dan internet. Selain itu, pendapat hukum dapat diperoleh dari narasumber.

c. Pengumpulan Data

Pengumpulan data digunakan untuk kepentingan penelitian yang dilakukan dengan cara:

- 1) Studi Kepustakaan, yaitu dengan mempelajari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan sekunder berupa pendapat hukum dan pendapat non hukum yang diperoleh dari buku, jurnal, hasil penelitian, tesis, laporan dan internet. Selain itu, pendapat hukum dapat diperoleh dari narasumber.
- 2) Wawancara, yaitu memperoleh data langsung dari narasumber. Wawancara berdasarkan daftar pertanyaan yang telah disusun oleh peneliti. Daftar pertanyaan yang telah disiapkan oleh peneliti adalah pertanyaan terbuka. Pertanyaan terbuka adalah peneliti menyusun daftar pertanyaan yang belum disertai jawaban dan narasumber menjawab sesuai dengan pengetahuan yang dimiliki.

d. Analisis

Analisis data dilakukan terhadap:

- 1) Bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan, sesuai tugas ilmu hukum normatif/dogmatik ada lima, yaitu;
 - a) Deskripsi hukum positif, yaitu pemaparan atau uraian isi maupun struktur dari peraturan perundang-undangan sesuai bahan hukum primer yang berkaitan dengan kewajiban

AMDAL terhadap revitalisasi Bangunan Cagar Budaya untuk kepentingan usaha di Kawasan Cagar Budaya Kotabaru di Kota Yogyakarta..

- b) Sistematisasi hukum positif, yaitu secara vertikal dan horizontal. Sistematisasi penelitian yang digunakan adalah sistematisasi secara vertikal. Secara vertikal ada ditemukan antinomi dan di antara Pasal demi Pasal tidak membentuk sinkronisasi dalam mengatur hal-hal yang serupa atau sama perihal kewajiban AMDAL. Prinsip penalaran hukumnya derogasi sehingga diperlukan asas berlakunya peraturan perundang-undangan yaitu Lex Superior Derogat Legi Inferiori.

Secara horizontal tidak ada ditemukan antinomi, karena antara Pasal demi Pasal telah mengatur hal yang sama perihal dokumen amdal di peraturan satu dengan yang lainnya sehingga membentuk harmonisasi dalam peraturan perundang-undangan ini. Prinsip penalaran hukumnya non kontradiksi sehingga tidak diperlukan asas berlakunya peraturan perundang-undangan.

- c) Analisis hukum positif, yaitu sistem peraturan perundang-undangan terbuka yang aturan hukum dan keputusan hukum harus sebagai tumpuan atas asas hukum dibalik asas hukum dapat di sistematisasikan gejala-gejala lainnya.

- d) Interpretasi hukum positif:

Ada enam interpretasi hukum positif, tapi dalam penelitian ini yang digunakan hanya tiga yaitu:

- a) Gramatikal yang ada di dalam peraturan perundang-undangannya, mengartikan term bagian kalimat menurut

bahasa sehari-hari atau bahasa hukum.

- b) Sistematisasi yang mendasarkan sistem aturan mengartikan suatu ketentuan hukum.

- c) Teleologi bahwa setiap peraturan perundang-undangan mempunyai tujuan tertentu.

- e) Menilai hukum positif dalam penelitian ini menilai peraturan perundang-undangan berkaitan dengan kewajiban AMDAL terhadap revitalisasi Kawasan Cagar Budaya di Kotabaru.

- 2) Bahan hukum sekunder yang berupa pendapat hukum yang diperoleh dari buku, hasil penelitian, internet dideskripsikan cari persamaan dan perbedaan. Selain itu, pendapat hukum dapat diperoleh dari narasumber.

- e. Proses berpikir/ Prosedur bernalar

Dalam penarikan kesimpulan, proses berpikir/ proses bernalar yang digunakan secara deduktif. Proses deduktif adalah bertolak dari proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat khusus. Dalam hal ini, proposisi umum berupa peraturan perundang-undangan tentang kewajiban suatu kegiatan dan/ atau usaha yang wajib AMDAL dan Kawasan Cagar Budaya yang akan di revitalisasikan sedangkan yang khusus berupa peraturan perundang-undangan tentang kewajiban AMDAL terhadap revitalisasi Bangunan Cagar Budaya untuk kepentingan usaha di Kawasan Cagar Budaya Kotabaru di Kota Yogyakarta.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

- a. Sejarah Kotabaru

Kawasan Kotabaru merupakan kawasan perumahan yang dibangun atas usul residen Yogyakarta yaitu Cornelis Canne setelah Perang Dunia I,

atau berakhirnya masa pemerintahan Sri Sultan Hamengku Buwana VII pada tahun 1877 – 1921. Pada tahun itu, Kawasan Kotabaru digunakan sebagai tempat pemukiman bagi masyarakat Hindia Belanda karena dianggap cocok dan ideal untuk dibangun perumahan. Perumahan yang dibangun di daerah Kawasan Kotabaru merupakan proyek pelaksanaan dari Departemen van Sultanaat Warken dengan ketuanya oleh Ir. L.V.R. Bijleveld, sebagaimana diatur dalam *Rijksblad van Sultanaat Djogjakarta* Nomor 12 Tahun 1917.⁵

Perkembangan Kawasan Kotabaru sebelum kemerdekaan, masa kemerdekaan dan setelah kemerdekaan. Sebelum kemerdekaan kawasan Kotabaru melewati masa Penjajahan Belanda dan masa Penjajahan Jepang. Masa Penjajahan Hindia Belanda pada tahun 1920 merupakan awal berdirinya kawasan perumahan Kotabaru, yang dibangun khusus untuk bangsa Eropa. Bangsa Eropa bekerja di bidang pemerintahan dan sektor perkebunan. Masuknya Bangsa Jepang untuk menjajah Indonesia, dan mundurnya Bangsa Hindia Belanda membuat kawasan Kotabaru yang awalnya diduduki oleh Bangsa Belanda menjadi milik Bangsa Jepang. Bangsa Jepang memanfaatkan Kotabaru sebagai kawasan perkantoran, perumahan, tangsi dan gudang, walaupun dilakukan perubahan fungsi pada bangunan, namun tidak dilakukan perubahan fisik bangunan yang signifikan.⁶

⁵ M. Heni Yuliana, 2013, *Keadaan Sosial Budaya Kotabaru Yogyakarta Pada Masa Kolonial (1917-1940)*, Skripsi, Yogyakarta, diakses <http://eprints.uny.ac.id/18143/4/BAB%20II%20fiks%20%2009.07.004%20Hen%20k.pdf> pada tanggal 18 November 2019 Pukul 17.00 WIB.

⁶ Theresiana Ani Larasati, *Kawasan Cagar Budaya Kotabaru Yogyakarta*, 2013, Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Istimewa Yogyakarta. Diakses [http://dpad.jogjapro.go.id/public/article/522/KAWASAN CAGAR BUDAYA KOTABARU1.pdf](http://dpad.jogjapro.go.id/public/article/522/KAWASAN%20CAGAR%20BUDAYA%20KOTABARU1.pdf)

Periode kemerdekaan Indonesia tahun 1945 terhadap kawasan Kotabaru tidak terjadi perubahan pada fisik bangunan, namun yang terjadi adalah peristiwa-peristiwa penting bagi perjuangan kemerdekaan dan peristiwa tersebut dikenal dengan peristiwa “Pertempuran Kotabaru” yang terjadi pada tanggal 7 Oktober 1945. Peristiwa ini terjadi di Asrama Kompi Tentara di Jalan Wardani yang pada Zaman Bangsa Jepang dipergunakan sebagai markas *Mase Butai*. Asrama ini menjadi sentral tempat peristiwa perebutan senjata dari berbagai arah, para pejuang mengepung tempat ini untuk melucuti peralatan senjata yang dimiliki bala tentara Jepang. Dalam peristiwa penyerbuan Kotabaru terdapat 21 orang pemuda Indonesia yang gugur dan 360 tentara Jepang yang ditawan.⁷ Akibat secara fisik dari peristiwa “Pertempuran Kotabaru” terhadap masa setelah kemerdekaan adalah dibangunnya monumen-monumen untuk mengenang peristiwa tersebut. Perubahan fisik bangunan yang diubah sangat mencolok terutama setelah tahun 1997 yaitu mulai berubahnya fungsi bangunan rumah tinggal menjadi fungsi lainnya seperti bangunan komersial (toko dan restoran), bangunan perkantoran, bangunan kesehatan dan bangunan pendidikan.⁸

b. Data

Data kuantitatif yang diperoleh dari Balai Pelestarian Cagar Budaya di Daerah Istimewa Yogyakarta terdapat 2 macam cagar budaya yaitu Cagar Budaya tidak bergerak dan Cagar Budaya yang bergerak.

Tabel 1: Cagar Budaya Tidak Bergerak

Cagar Budaya Tidak	Jumlah
--------------------	--------

^f, pada tanggal 15 November 2019 pukul 14.35 WIB.

⁷ Wahyu dalam artikel Theresiana Ani Larasati, *Op. Cit.* dalam Tesis Harry Trisatya Wahyu, *Loc. Cit.* hlm.129.

⁸ Theresiana Ani Larasati, *Op. Cit.*

Bergerak	
A. Kota Yogyakarta	342
B. Sleman	293
C. Bantul	118
D. Gunungkidul	117
E. Kulonprogo	42
TOTAL	912

Sumber: Balai Pelestarian Cagar Budaya DIY

Dari data yang diperoleh, untuk Cagar budaya tidak bergerak di Daerah Istimewa Yogyakarta totalnya berjumlah 912 buah. Pembagian untuk Cagar Budaya tidak Bergerak sesuai dengan tabel 1 yaitu di Kota Yogyakarta terdapat 324 buah, kabupaten Sleman terdapat 293 buah, kabupaten Bantul 118 buah, kabupaten Gunungkidul terdapat 117 dan Kabupaten Kulon Progo terdapat 42 buah. Wilayah yang menduduki posisi tertinggi untuk cagar budaya tidak bergerak adalah Kota Yogyakarta dan untuk posisi terendah adalah Kulonprogo.

Tabel 2: Cagar Budaya Bergerak

Cagar Budaya Bergerak	Jumlah
A. Kota Yogyakarta	11
B. Sleman	48
C. Bantul	51
D. Gunungkidul	74
E. Kulonprogo	32
TOTAL	216

Sumber: Balai Pelestarian Cagar Budaya DIY

Berdasarkan tabel nomor 2, cagar budaya bergerak berjumlah 216 buah. Untuk pembagiannya adalah Kota Yogyakarta terdapat 11 buah, Kabupaten Sleman terdapat 48 buah, Kabupaten Bantul terdapat 52 buah, Kabupaten Gunung Kidul terdapat 74 buah, dan Kabupaten Kulon Progo terdapat 32 buah. Berbeda dengan Cagar Budaya tidak bergerak yang memperoleh kedudukan tertinggi adalah Kota Yogyakarta sedangkan posisi tertinggi untuk Cagar Budaya

bergerak adalah Kabupaten Gunungkidul, Kota Yogyakarta menduduki posisi terakhir.

Tabel 3: Kawasan Cagar Budaya

No	Kawasan Cagar Budaya	SK Penetapan
1	Kraton	SK Gubernur 2011
2	Puro Pakualaman	SK Gubernur 2011
3	Kotagede	SK Gubernur 2011
4	Imogiri	SK Gubernur 2011
5	Kotabaru	SK Gubernur 2011
6	Malioboro	SK Gubernur 2011
7	Ambarkerawang	SK Bupati
8	Ambarbinangun	SK Bupati
9	Pleret	situs, dalam proses penetapan
10	Sokoliman	situs, dalam proses penetapan
11	Prambanan	SK Menteri
12	Ratu Boko	SK Menteri
13	Parangtritis	situs, dalam proses penetapan

sumber: penyusunan rencana Induk Program Pelestarian dan Pengembangan Kawasan Cagar Budaya

Kawasan Cagar Budaya yang sudah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 186/KEP/2011 tentang Penetapan Kawasan Cagar Budaya, ada enam (6) Kawasan Cagar Budaya yaitu Kotagede, Keraton, Malioboro, Pakualaman, Kotabaru, dan Imogiri, 6 kawasan tersebut merupakan Kawasan Cagar Budaya di Kota Yogyakarta. Kawasan Cagar Budaya yang berada di Daerah Istimewa Yogyakarta ada 13 sudah termasuk Kawasan Cagar Budaya di Kota Yogyakarta yaitu Kotagede, Keraton, Malioboro, Pakualaman, Kotabaru, dan Imogiri, yang lain menjadi kewenangan pusat (Prambanan dan Ratu Boko) dan kabupaten (Ambarketawang,

Ambarbinangun, Parangtritis, Pleret, Sokoliman). Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang memiliki 13 Kawasan Cagar Budaya yang tersebar di Kabupaten Bantul sebanyak 3 Kawasan Cagar Budaya, di Kabupaten Gunungkidul sebanyak 1 Kawasan Cagar Budaya, di Kabupaten Sleman sebanyak 3 Kawasan Cagar Budaya, di Kota Yogyakarta sebanyak 6 Kawasan Cagar Budaya.⁹

c. Analisis

Dari penelitian yang saya lakukan di Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta yang saya lakukan pada tanggal 18 November 2019 bersama Bapak Magaliasih Pasorong Randa, S.T., selaku Kepala Seksi Kajian Dampak Lingkungan di Bidang Penataan dan Pengendalian Dampak Lingkungan bahwa dalam menentukan kegiatan dan/atau usaha wajib AMDAL atau tidak yang nama penapisan/ *screening* disebut juga proses seleksi wajib AMDAL. Berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 38 Tahun 2019 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup bahwa ada membahas mengenai kawasan lindung dipenjelasan Peraturan Menteri tersebut ada penjelasan mengenai daftar kawasan lindung yang salah satunya adalah Kawasan Cagar Budaya. Menurut Beliau, semua kegiatan baik itu pembangunan maupun operasional wajib memiliki AMDAL walaupun dalam peraturan tersebut ada bagian-bagian yang dikecualikan misalnya yang dikecualikan adalah berdampaknya tidak terlalu penting terhadap Kawasan Cagar Budaya. Kegiatan dan/atau usaha yang dikecualikan dari AMDAL tidak dibebaskan dalam membuat dokumen lingkungan hidup jika kegiatan tersebut

dikecualikan dari AMDAL maka wajib membuat UKL-UPL berdasarkan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.¹⁰

Kawasan Cagar Budaya Kotabaru belum ada kegiatan yang sudah memiliki dokumen AMDAL tetapi untuk UKL-UPL sudah ada yang dilaksanakan. Pemerintah Kota Yogyakarta sedang merencanakan revitalisasi untuk Stadion Kridosono di Kotabaru dan sedang dalam proses penyusunan dokumen AMDAL. Revitalisasi untuk Stadion Kridosono merupakan kegiatan pertama yang akan memiliki AMDAL.

Kegiatan yang mempunyai UKL-UPL seperti Si Lol kopi yang mempunyai izin lingkungan sejak tahun 2017, cafe legend sejak tahun 2014, dan hotel fave sejak tahun 2017, lebih lengkap ada di tabel nomor 4 mengenai Izin Lingkungan. Kegiatan yang masih belum memiliki izin lingkungan di kawasan Kotabaru hingga sekarang seperti Richeese Factory jalan Jendral Sudirman Nomor 46 Kotabaru, The House of Raminten di jalan Farinda M. Nota Nomor 7 Kotabaru.

Menurut analisi penulis, berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta bahwa dalam ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan yaitu "*setiap kegiatan dan/atau usaha yang tidak termasuk dalam kriteria wajib AMDAL wajib memiliki UKL-UPL*", penulis setuju dengan pendapat narasumber bahwa kegiatan dan/atau usaha yang dikecualikan dari AMDAL tidak dibebaskan dalam membuat dokumen lingkungan hidup jika kegiatan tersebut dikecualikan dari AMDAL maka wajib membuat UKL-UPL. Faktanya yang ada di lapangan,

⁹ Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, 2014, *Laporan Kinerja (LKj)*, Yogyakarta, hlm. 111-113.

¹⁰ Magaliasih Pasorong Randa, S.T., menjabat sebagai Kepala Seksi Kajian Dampak Lingkungan di Bidang Penataan dan Pengendalian Dampak Lingkungan, pada tanggal 18 November 2019.

masih banyak kegiatan dan/atau usaha yang masih belum memiliki dokumen izin lingkungan hidup baik dokumen AMDAL maupun UKL-UPL seperti Richeese Factory jalan Jendral Sudirman, Sendok Bebek di jalan Jendral Sudirman, LBC di jalan Saryoto.

Berdasarkan beberapa contoh bangunan yang sudah dibahas, maka bangunan yang didirikan terdiri atas dua yaitu bangunan baru dan bangunan lama yang dirobohkan. Menurut penulis berdasarkan Pasal 1 ayat (3) bahwa *“revitalisasi adalah kegiatan pengembangan yang ditujukan untuk menumbuhkan kembali nilai-nilai penting Cagar Budaya dengan penyesuaian fungsi ruang baru yang tidak bertentangan dengan prinsip pelestarian dan nilai budaya masyarakat.”*

Jadi ketika orang membangun atau merobohkan bangunan itu tidak ada larangan, yang penting tidak bertentangan dengan prinsip pelestarian dan nilai budaya masyarakat dan juga memenuhi syarat revitalisasi.

Berdasarkan data yang diperoleh, contoh bangunan di Kawasan Cagar Budaya Kotabaru seperti bangunan Richeese Factory jalan Jenderal Sudirman merupakan bangunan bergaya Indis yang dilakukan adaptasi dari bangunan yang sebelumnya. Dapat dikatakan adaptasi karena berdasarkan Pasal 83 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, yaitu: *“Bangunan Cagar Budaya atau Struktur Cagar Budaya dapat dilakukan adaptasi untuk memenuhi kebutuhan masa kini dengan tetap mempertahankan ciri asli dan/atau muka Bangunan Cagar Budaya atau Struktur Cagar Budaya.”*

Menurut penulis, bangunan Richeese Factory jalan Jenderal Sudirman masih mempertahankan ciri asli dan muka Bangunan Cagar Budaya,

karena perubahan dari rumah Mr. Djody Gondokusumo ke Bank NISP lalu Richeese Factory di bagian muka masih kelihatan sama.

Ada bangunan yang melakukan revitalisasi dan adaptasi contohnya Sendok Bebek jalan Jenderal Sudirman. Revitalisasi yang dilakukan oleh rumah makan Sendok Bebek ada pada bagian depan rumah yang dibangun atap. Untuk adaptasinya sudah sesuai dengan Pasal 83 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya yaitu mempertahankan gaya arsitektur, konstruksi asli, dan keharmonisan estetika lingkungan sekitar. Rumah makan Sendok Bebek masih bangunan arsitektur bergaya Indis.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kewajiban AMDAL dapat dikecualikan, salah satunya untuk menunjang pelestarian Kawasan Cagar Budaya berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 38 Tahun 2019 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup. Berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan bahwa setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib AMDAL maka wajib memiliki UKL-UPL. Revitalisasi yang dilakukan untuk kepentingan usaha di Kawasan Cagar Budaya Kotabaru di Kota Yogyakarta sudah banyak dilaksanakan. Izin lingkungan terhadap usaha-usaha tersebut di Kawasan Cagar Budaya Kotabaru masih belum ada yang memiliki dokumen AMDAL tapi memiliki UKL-UPL

5. REFERENSI

Fahmi Prihantoro, 2019, “Peningkatan Kesadaran terhadap Cagar Budaya di Kotabaru Melalui Kegiatan

- Jelajah Wisata *Heritage* bagi Generasi Muda di Kota Yogyakarta”, *Bakti Budaya*, Vol. 2 No. 1 April 2019, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Harry Trisatya Wahyu, 2011, *Pelestarian dan Pemanfaatan Bangunan Indis Di Kawasan Kotabaru*, Tesis, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Ign. Eka Hadiyanta, 2015, “Kawasan Cagar Budaya Di Yogyakarta: Citra, Identitas, dan Branding Ruang”, *Jurnal Widya Prabha*, Vol-04/IV/2015 ISSN 2302-8998, Balai Pelestarian Cagar Budaya, Yogyakarta.
- M. Heni Yuliana, 2013, *Keadaan Sosial Budaya Kotabaru Yogyakarta Pada Masa Kolonial (1917-1940)*, Skripsi, Yogyakarta, diakses <http://eprints.uny.ac.id/18143/4/BA%20II%20fiks%20%2009.07.004%20Hen%20k.pdf> pada tanggal 18 November 2019 Pukul 17.00 WIB.
- Magaliasih Pasorong Randa, menjabat sebagai Kepala Seksi Kajian Dampak Lingkungan di Bidang Penataan dan Pengendalian Dampak Lingkungan, pada tanggal 18 November 2019.
- Muhammad Abdun Nasir, 2015, Semarang, diakses https://lib.unnes.ac.id/21663/1/81114100_57-s.pdf, diakses pada tanggal 15 November 2019 pukul 14.39 WIB.
- Muhammad Akib, 2014, *Hukum Lingkungan: Perspektif Global dan Nasional*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, 2014, *Laporan Kinerja (LKj)*, Yogyakarta.
- Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, 2009, Undang-Undang Reuplik Indonesia Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Lembaran Negara Nomor 5059, CV. Eko Jaya, Jakarta.
- Theresiana Ani Larasati, *Kawasan Cagar Budaya Kotabaru Yogyakarta*, 2013, Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Istimewa Yogyakarta. Diakses http://dpad.jogjaprovo.go.id/public/article/522/KAWASAN_CAGAR_BUDAYA_KOTABARU1.pdf, pada tanggal 15 November 2019 pukul 14.35 WIB.